I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan (land based agricultu are activities).

Kondisi penggunaan lahan Kota Parepare secara umum terdiri atas; permukiman dan bangunan sarana lainnya, persawahan, kebun campuran, hutan dan lain sebagainya. Pergesaran pemanfaatan lahan Kota Parepare secara umum mengalami perubahan yang cukup drastis, pada beberapa areal lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Dari sumber data yang diperoleh menunjukkan pola penggunaan lahan Kota Parepare didominasi oleh pemanfaatan lahan untuk areal permukiman dan guna lahan lainnnya dengan luas 6.041,50 Ha, dengan total luas wilayah 9.933 Ha. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi dan jenis pemanfaatan lahan Kota Parepare (RPI2JM 2017-2021 Kota Parepare Sulawesi Selatan)

Tabel 1. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Kota Parepare Tahun 2011

PENGGUNA LAHAN	LUAS (HEKTAR)	PERSENTASE (%)
Permukiman & Guna Lahan lainnya	6.041,50	60,82
Lahan Sawah	523,00	5,27
Hutan Rakyat	350,00	3,52
Hutan Produksi	352,00	3,54
Hutan Lindung	2.050,00	20,64
Lahan Kritis	250,50	2,52
Hutan Kota	97,50	0,96
Perkebunan	267,50	2,69
JUMLAH	9.933,00	100,00

Sumber : Kota Parepare Dalam Angka, 2011

Pembangunan suatu wilayah di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, Selain itu juga ada kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini menjadi masalah bahwa tata ruang sering mengikuti perkembangan pola ruang yang telah ada tanpa adanya suatu analisis terhadap kelayakan penggunaan tata ruang sesuai dengan kemampuan lahan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus menunjukkan jika disuatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progesif. Sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri disuatu

lokasi alih fungsi lahan, maka aksebilitas dilokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman (Lapatandau, dkk. 2017).

Alih fungsi lahan pertanian yang terus-menerus berlangsung dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan pangan, Hal ini dapat terjadi karena alih fungsi lahan pertanian sebagian besar hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa memperhitungkan berbagai jenis dan besaran manfaat penting, seperti nilai pasif yang melekat pada lahan pertanian yang bisa saja berkurang atau bahkan hilang pada beberapa tahun kemudian. Dengan kata lain, alih fungsi lahan pertanian dapat dikatakan sebagai suatu fenomena pembangunan yang dapat terjadi selama proses pembangunan masih berlangsung (Munir, 2008).

Arah pembangunan Kota Parepare sebagai industri pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, serta daerah transit, menarik minat orang luar daerah untuk berinvestasi dalam bentuk tanah, bangunan atau untuk bermukim di daerah ini. Kepadatan penduduk dan lahan yang terbatas di perkotaan membuat pembangunan mengarah ke wilayah pinggiran perkotaan khususnya Kecamatan Bacukiki. Jika tidak direncanakan dengan baik maka di masa mendatang lahan pertanian tidak dapat dipertahankan dan beralih fungsi menjadi pusat permukiman, perdagangan, industri dan jasa. Perubahan ini akan memberikan tekanan pada sektor pertanian di wilayah tersebut.

Masalah utama sehubungan dengan alih fungsi lahan di Kecamatan Bacukiki, yaitu perubahan struktur pemanfaatan ruang yang berimplikasi pada berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan terbangun berupa permukiman, perdagangan dan jasa.

Konflik penggunaan dan pemanfaatan lahan di Kecamatan Bacukiki bersifat dilematis mengingat peluang perluasan areal pertanian baru sudah sangat terbatas, tuntutan terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangan sektor industri, jasa, dan properti semakin meningkat. Sektor pertanian mengalami penurunan serta kurangnya minat pemuda untuk terjun ke bidang pertanian.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitan agar diperoleh kesimpulan yang valid dari hasil kajian dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi Ekonomi Petani di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

1.2. Perumusan Masalah

Alih fungsi lahan pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan, namun perlu dikendalikan. Secara umum, masalah alih fungsi dalam penggunaan lahan terjadi karena migrasi penduduk yang tidak terkendali, kriteria kawasan yang belum jelas, koordinasi pemanfaatan ruang yang belum ada, dan penegakan hukum yang masih lemah. Potensi dampak yang terjadi kurang diperhatikan oleh petani dan pemerintah daerah. Upaya untuk pengendalian terhadap alih fungsi lahan tersebut pun sepertinya terabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi ekonomi petani di Kecamatan Bacukiki?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Bacukiki?
2. Mengkaji dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi ekonomi petani di Kecamatan Bacukiki?

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Parepare dalam membuat kebijakan terkait pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pembangunan pertanian.
2. Bagi petani pada umumnya, informasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengalih fungsikan lahan pertanian mereka.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

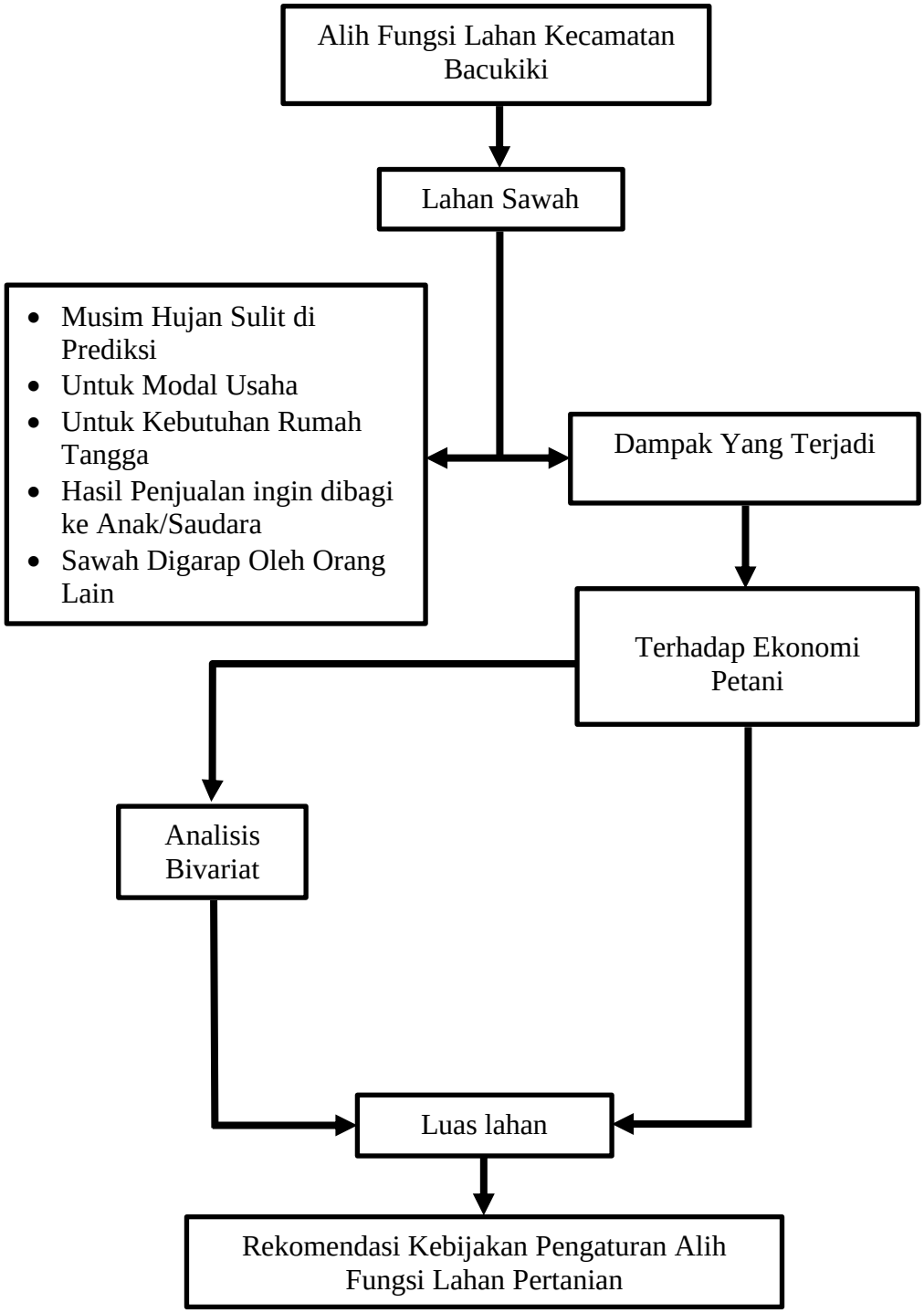
1.5. Kerangka Pikir

Adapun ruang lingkup sebagai batasan-batasan dari penelitian ini adalah:

1. Lahan pertanian yang dikaji terbatas pada lahan sawah dan hasil produksinya berupa padi atau gabah.
2. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dilihat dari faktor Ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani.
3. Pendapatan yang diperhitungkan dilihat dari perubahan pendapatan rata-rata petani sebelum dan setelah kegiatan alih fungsi lahan.

Pembangunan sektor ekonomi yang ada dalam suatu wilayah, sangat berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan salah satunya terjadi pada sektor industri. Pertumbuhan sektor industri yang sangat cepat menyebabkan permintaan akan kebutuhan lahan akan semakin meningkat. Sehingga, lahan yang awalnya berupa lahan pertanian, khususnya sawah kini menjadi lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan kebutuhan tempat tinggal serta sarana dan prasarana sehari-hari akan meningkat. Adanya peningkatan kebutuhan tempat tinggal, mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap lahan. Sehingga, lahan yang sifatnya relatif tetap, dengan kebutuhan serta permintaan yang tidak terbatas, mengakibatkan adanya konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Hal tersebut mengakibatkan, jumlah lahan pertanian mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Konversi lahan sawah secara langsung terjadi sebagai akibat dari keputusan pemilik lahan sawah untuk mengalihkan lahan tersebut ke jenis pemanfaatan lain, diantaranya dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Sedangkan konversi lahan secara tidak langsung terjadi akibat makin menurunnya kualitas lahan sawah, diantaranya dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan pertanian. Skema faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian beserta dampak terhadap pendapatan petani ditampilkan secara sederhana dalam Gambar 1. (halaman 8).



Keterangan :

Gambar 1. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ekonomi Petani Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, hingga teruji lewat data yang terkumpul (Arikunto, 2006). Sebaliknya Sugiyono (2013), menerangkan kalau hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang keabsahannnya dibuktikan dengan cara objektif.

Dari kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan

Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan

Sebelum melakukan analisis bivariat untuk membuktikan hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas (Stang, 2018), untuk mengetahui jenis uji statistik yang akan digunakan.

- Apabila data berdistribusi normal, maka digunakan uji parametrik yaitu uji t-berpasangan
- Apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji nonparametrik yaitu uji Wilcoxon

Dasar Pengambilan Keputusan, menurut Ghozali (2018):

- Apabila nilai Sig.> 0,05 maka data berdistribusi normal
- Apabila nilai Sig.<0,05 maka data tidak berdistribusi normal

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanah Sebagai Lahan Pertanian

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Tanah menjadi sangat penting karena keberadaanya dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia dalam melakukan kegiatannya. Tanah sebagai lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting perannya dalam pertanian jika dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Jika tidak ada lahan, maka tidak akan ada pertanian. Hal ini dikarenakan lahan tersebut merupakan tempat dimana pertanian tersebut dapat berjalan.

Permintaan akan tanah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini yang mengakibatkan harga tanah semakin tinggi. Umumnya tingginya permintaan tersebut seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah besar. Selain itu banyak juga lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai pabrik industri, hal ini yang mengakibatkan harganya terus mengalami kenaikan. Pada dasarnya penggunaan tanah yang ada sekarang ini digunakan untuk sektor pertanian. Lahan sebagai salah satu faktor produksi merupakan tempat proses produksi dan hasil produksi pertanian diperoleh (Astuti, 2011).

Pertanian terutama di negara berkembang termasuk Indonesia, faktor produksi lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima dari lahan dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Bagi petani, lahan mempunyai arti penting karena dari situlah mereka dapat bertahan hidup bersama keluarganya, melalui kegiatan bercocok

tanam dan beternak. Lahan merupakan faktor produksi dalam berusaha tani, maka keadaan status penguasaan terhadap lahan menjadi sangat penting. Ini berkaitan dengan keputusan jenis komoditas apakah yang mau diusahakan dan juga berkaitan dengan besar kecilnya bagian yang akan diperoleh dari usaha tani yang diusahakan (Munir, 2008).

Menurut Ritung, dkk. (2011) lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia, baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan-lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu. Penggunaan lahan secara optimal perlu dikaitkan dengan karakteristik dan kualitas lahan. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan penggunaan lahan, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambungan. Penggunaan lahan adalah pemanfaatan sebidang lahan untuk tujuan tertentu. Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan atas penggunaan lahan semusim, tahunan dan permanen.

Penggunaan lahan semusim diarahkan untuk tanaman semusim, pola tanam yang diterapkan dapat rotasi atau tumpang sari, dan panen dapat dilakukan setiap musim dengan periode kurang dari setahun. Penggunaan lahan tahunan merupakan penggunaan lahan jangka panjang yang pergiliran tanamannya dilakukan setelah tanaman pertama secara ekonomi tidak menguntungkan lagi, seperti pada perkebunan. Penggunaan lahan permanen merupakan penggunaan lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian, seperti hutan, daerah konservasi, perkotaan, desa dan lain-lain.

2.2. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Konversi lahan atau disebut juga alih fungsi lahan merupakan suatu bentuk aktivitas yang menyebabkan adanya perubahan struktur penggunaan lahan dari kondisi semula atau awalnya, misalnya dari penggunaan untuk lahan pertanian menjadi lahan industri atau pemukiman. Sistem persawahan Indonesia bukanlah semata-mata diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Perkembangan yang telah berlangsung ribuan tahun, sistem persawahan telah memelihara keberlangsungan sistem produksi dan lingkungan hidup dan juga mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Namun demikian, eksistensi sistem persawahan menghadapi berbagai ancaman sejalan dengan makin rusaknya sumber daya alam akibat pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif. Lahan sawah di daerah padat penduduk mengalami konversi menjadi lahan untuk berbagai keperluan.

Sejalan dengan perubahan struktur perekonomian yang merupakan ciri perkembangan suatu negara atau daerah, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan tersebut menyebabkan konversi lahan pertanian sulit dihindari dengan kata lain setiap tahunnya terjadi konversi lahan. Luas konversi lahan tersebut setiap tahunnya akan semakin besar karena konversi lahan pertanian umumnya menular. Dengan kata lain, sekali konversi lahan terjadi di suatu lokasi maka luas lahan yang akan dikonversi di lokasi tersebut akan semakin besar akibat konversi lahan ikutan yang terjadi di lokasi sekitarnya (Lapatandau, dkk. 2017).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. *Kedua*, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Banyaknya lahan para petani yang belum bersertifikat menambah dampak buruk bagi masa depan para petani yang menyebabkan terjadinya persengketaan antara pihak petani dan pihak yang mencoba merampas hak milik petani dimana posisinya memanfaatkan kesempatan pada lahan yang belum berlabel pemilik. Bahkan kerap terjadi persengketaan antara petani dengan pihak pemerintah dalam kepemilikan lahan.

Dampak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, serta prioritas pembangunan pertanian wilayah dan nasional (Nasoetion dan Winoto, 1996).

2.3. Pola dan Karakteristik alih Fungsi Lahan

Sumaryanto dan Tahlim (2005) mengungkapkan bahwan pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Motif dari pemilik lahan pertanian untuk merubah penggunaan lahannya antara lain, karena pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha. Sebagaimana diketahui para petani umumnya berpendapatan sedikit karena kebijakan pemerintah dalam pengaturan harga komoditas pertanian yang kurang bijak dibandingkan dengan harga input pertanian yang tinggi. Sehingga mereka cenderung membuat tempat tinggal untuk keturunannya atau membuat usaha lain dengan mengalihfungsikan lahan pertanian milik mereka sendiri.

Dampak dari alih fungsi ini akan baru terasa dalam jangka waktu yang lama. Kedua, alih fungsi lahan yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik lahan menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha non pertanian. Para petani yang cenderung berpendapatan kecil akan menjual lahannya karena tergiur akan harga lahan yang ditawarkan oleh para investor. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan pertanian dengan pola ini berlangsung cepat dan nyata.

Sihaloho (2007) membagi konversi lahan ke dalam tujuh pola atau tipologi yaitu:

1) Konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan masalah ekonomi pelaku konversi;

2) Konversi sistematik berpola ‘*enclave’*; dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah;
3) Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk *(population growth driven land conversion);* lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal;
4) Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial *(social problem driven land conversion);* disebabkan oleh dua faktor yakni masalah ekonomi dan perubahan kesejahteraan;
5) Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung;
6) Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena masalah ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian;
7) Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya untuk perkantoran, sekolah koperasi perdagangan termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

2.4. Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Petani hanya bermodalkan semangat sebagai landasan utama dalam mempertahankan lahan untuk mereka olah agar dapat memperoleh pendapatan agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik. Namun hal ini sering tidak sesuai dengan harapan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat oleh petani. Terkadang petani telah mengeluarkan banyak modal untuk

usahatani yang dilakukan namun hasilnya tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan bahkan terkadang petani mengalami kerugian dalam gagal panen atau bahkan jatuhnya harga padi yang mereka jual.

Susanto (2010) menyatakan bahwa petani memiliki dua peranan dalam pengelolaannya yaitu petani sebagai juru tani dan sebagai manajer. Agar dapat menjalankan perananannya dengan baik maka petani perlu belajar. Proses belajar yang baik dan positif sangat ditentukan oleh faktor internal dan ekternal petani atau daya-daya yang dimiliki oleh petani. Faktor yang mempengaruhi keputusan petani pada penelitin yang dilakukan oleh Hamzah, dkk. (2014) menyatakan bahwa pada faktor ekonomi dan faktor sosial yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengkonversi lahan sawah irigasi. Pendapatan yang diterima oleh petani berpengaruh pada keputusan petani dalam mengkonversi atau memiliki keputusan untuk mengkonversi lahan sawah yang dimilikinya. Sedangkan pada fakor sosial jumlah anggota keluarga dan kendala teknis pada pengolahan lahan usahatani yang dilakukan sebagai penentu untuk petani dalam mengkonversi lahan yang dimilikinya.

Umur, pengalaman berusahatani, pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah tanggungan keluarga, status kepemilikan lahan usahatani, status usahatani, lokasi usahatani dari tempat tinggal petani padi sawah, lokasi usahatani dari pasar terdekat, dan luas lahan usahatani yang dimiliki oleh petani menjadi faktor-faktor sosial pada penelitian ini yang diduga berpengaruh pada keputusan petani untuk menjual lahan usahatani yang dimilikinya, sedangkan pada faktor

ekonomi terdiri dari biaya usahatani, penerimaan luar usahatani, pengeluaran rumah tangga petani padi sawah, pendapatan perluas lahan usahatani.

Menurut Pakpahan, dkk. (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung atau mikro yaitu faktor konversi di tingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung keputusan petani. Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, seperti pendidikan, pendapatan, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi di tingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Faktor ini mempengaruhi faktor-faktor lain yang nantinya berpengaruh terhadap keputusan petani. Faktor tersebut antara lain seperti pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa yang akan meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi dan lahan untuk industri.

Proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (1) sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah, dan (2) sistem non-kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah antara lain direpresentasikan dalam bentuk terbitnya beberapa peraturan mengenai konversi lahan (Nasoetion dan Winoto, 1996). Menurut Supriyadi (2004) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu :

1. Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi.
2. Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3. Faktor Kebijakan. yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan.

Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Menurut Pakpahan, dkk. (1993), faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung atau mikro yaitu faktor konversi di tingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung keputusan petani. Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, seperti pendidikan, pendapatan, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi di tingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Faktor ini mempengaruhi faktor-faktor lain yang nantinya berpengaruh terhadap keputusan petani. Faktor tersebut antara lain seperti pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa yang akan meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi dan lahan untuk industri.

Menurut Winoto (2005) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain :

1. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya *land rent* yang diperoleh aktifitas sektor non pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak menyebabkan terjadinya konversi lahan.
3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimun skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Perilaku *myopic*, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian.
5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada.

2.5. Dampak Alih Fungsi Lahan

Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman mempunyai dampak positif dan negatif. Menurut Putri (2008), dampak positif dari pembentukan pemukiman yaitu menyebabkan meningkatnya nilai ekonomis yaitu melalui sewa menyewa kontarakan. Namun peningkatan nilai ekonomis ini hanya diterima oleh pemilik tempat sewa tempat tinggal. Konversi lahan juga dapat meningkatnya tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, ditunjukkan perubahan pola hidup yang menjadi konsumtif (Munir, 2008). Dari sudut pandang sosial ekonomi, sebagian dari mereka justru mengalami perbaikan kesejahteraan, terutama bagi pemilik lahan yang sejak semula merupakan bagian dari lapisan atas penduduk setempat. Walaupun begitu, kecenderungan konversi lahan memang banyak memberikan dampak negatif dari pada positif. Dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua segi (Ilham, dkk. 2006).

Alih fungsi lahan sawah menimbulkan dampak bagi petani maupun pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak. Utamanya terjadi pengurangan produksi padi yang berdampak langsung kepada konsumsi dan juga penghasilan petani. Disamping itu ada pula dampak positif bagi peningkatan pembangunan kota bagi pemerintah maupun investor. Namun perhitungan dari kerugian maupun manfaat yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan tidak bisa dihitung secara pasti karena beberapa dari kerugian dan manfaat alih fungsi lahan sulit untuk diukur. Menurut Nuryati (1995) masalah yang timbul akibat konversi lahan sawah ke penggunaan non sawah adalah terancamnya swasembada beras yang telah dicapai dengan susah payah. Di samping itu alih fungsi lahan sawah ini mempunyai

opportunity cost yang sangat besar, diantaranya adalah penurunan produksi pangan lokal atau nasional yang secara tidak langsung akan mengurangi kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, penurunan laju daya serap tenaga kerja sektor pertanian, terbengkalainya investasi irigasi dan terdapat dampak alih fungsi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Lahan sawah pada umumnya diperuntukan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Dari segi bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk dan sistem irigasi. (Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran 1996 dalam Ilham, dkk. 2006).

Berikut adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya konversi lahan:

1. Berkurangnya lahan pertanian.

   Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menurunnya produksi pangan nasional.

   Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit

tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

3. Mengancam keseimbangan ekosistem.

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

4. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai.

Untuk membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya, akan banyak kita jumpai proyek-proyek berbagai jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, membangun drainase, serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian, sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

5. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan.

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang

butuh tenaga, sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

6. Harga pangan semakin mahal.

Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar, maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.

7. Tingginya angka urbanisasi.

Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat. Orang-orang dari desa akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi setelah sampai di kota keadaan mereka tidak berubah karena persaingan semakin ketat.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi pengambilan data untuk penelitian yang dipilih adalah di Kecamatan Bacukiki. Lokasi ini dipilih karena di daerah tersebut banyak dibangun pemukiman dan usaha-usaha industri. Kecamatan Bacukiki juga termasuk zona pengembangan perkotaan, memiliki wilayah dengan lahan pertanian terluas di Kota Parepare tata guna lahan di daerah tersebut pada saat ini mayoritas merupakan lahan sawah dan perkebunan, sehingga memberikan implikasi adanya perubahan tata guna lahan yang mengarah ke Kecamatan Bacukiki. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang. Proses pengumpulan data primer dan sekunder di wilayah tersebut dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021.

3.2. Bentuk Penelitian

Mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut rancangan penelitian ini berbentuk explanatory research, yang menurut Singarimbun dan Efendi (2008) bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Di samping itu, penjelasan secara deskriptif dan kualitatif dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi sebanyak mungkin, sehingga dapat mendukung dan memberi makna data kuantitatif dengan melalui cara pengamatan dan wawancara mendalam.

3.3. Populasi dan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei terhadap petani yang bersangkutan. Petani yang memiliki lahan sawah yang dialihfungsikan dan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara snowball sampling. Teknik snowball sampling merupakan bentuk dari non-probability sampling method. Metode ini dipilih karena jumlah populasi yang akan diteliti belum diketahui secara pasti (Sugiyono, 2014).

Menurut Sugiyono (2014) cara ini dilakukan dengan mencari sampel pertama dan mewawancarainya. Setelah itu peneliti meminta sampel pertama menunjukkan orang lain yang di sekitarnya yang dapat diwawancarai sesuai kriteria yang diinginkan oleh peneliti dan seterusnya. Sampel yang diambil sebanyak 30 petani yang memiliki lahan sawah yang dialihfungsikan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, yaitu pengumpulan informasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian selain itu juga dilakukan teknik wawancara yaitu dengan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan tanya jawab melalui responden dengan menggunakan kuesioner.

Data sekunder diperoleh dari literatur, dan jurnal ilmiah penelitian terdahulu, serta data dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Kelautan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

3.5. Definisi Konsep dan Operasional

Operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian :

1. Konversi lahan atau alih fungsi lahan merupakan suatu bentuk aktivitas yang menyebabkan adanya perubahan struktur penggunaan lahan dari kondisi semula.
2. *Land based agricultu are activities* adalah kegiatan pertanian yang masih bertumpu pada lahan.
3. Konversi gradual berpola sporadic adalah perubahan lahan secara bertahap atau sedikit demi sedikit.
4. Konversi sistematik berpola '*enclave'* adalah sehamparan tanah yang terkonversi secara serentak.
5. Demografi adalah data statistik yang menyangkut populasi penduduk yang didasarkan atas berbagai klasifikasi seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan pendidikan.
6. *Land Rent* adalah sistem sewa tanah.
7. *Opportunity Cost* adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan.
8. Satuan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data, yaitu metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan interpretasi data dan informasi pada tabulasi data. Metode analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya serta dampak dari alih fungsi lahan tersebut. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dan informasi yang didapat dilakukan secara manual menggunakan komputerisasi dengan program *Microsoft office excel 2010, Statistical Product and Service Solution 25.0.*

3.6.1 Metode Deskriptif

Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan sesuatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya.

Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena, Penggambaran kondisi bisa individual atau kelompok, dan menggunakan angka-angka (Nazir, 2005).

3.6.2 Analisis Bivariat

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis bivariat, analisis ini dilakukan untuk mencari korelasi atau pengaruh antara 2 variabel atau lebih yang diteliti. Dalam penilitian ini variable tersebut adalah alih fungsi lahan dan pendapatan petani. Pada penelitian ini sebelum melakukan analisis bivariat untuk membuktikan hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas (Stang, 2018), untuk mengetahui jenis uji statistik yang akan digunakan.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Batas Wilayah Kota Parepare

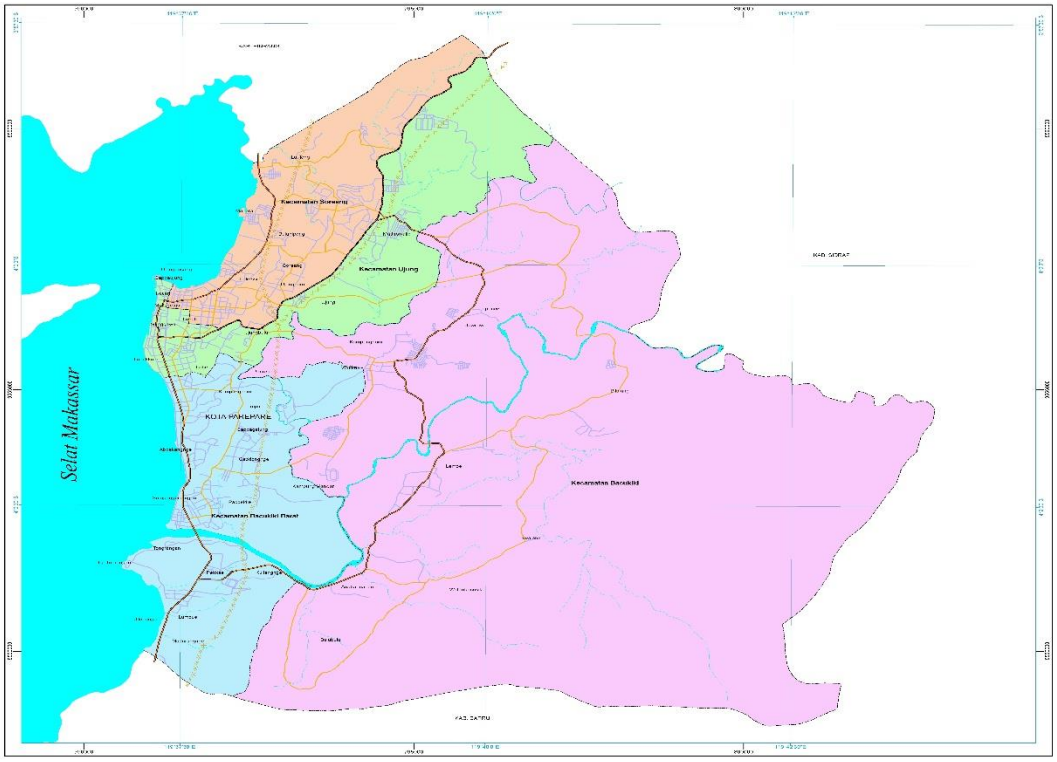
Secara geografis wilayah Kota Parepare terletak ± 155 km arah utara Kota Makassar dengan posisi 3°57´3´´- 4°04´49´´ Lintang Selatan dan 119°36´24´´-119° 43´40´´ Bujur Timur, adapun letak Kota Parepare ditinjau dari aspek administrasi berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabaupaten Sidenreng Rappang

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar



Gambar 2. Peta Wilayah Kota Parepare Sumber: RTRW Kota Parepare 2011 - 2031

4.2. Administrasi dan Demografi

Secara administratif Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan total luas Kota Parepare 99,33 Km^2 atau 9.933 hektar, rincian jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Administrasi Pemerintah Kota Parepare

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Bacukiki	4	66,70	19.810
2	Bacukiki Barat	6	13,00	44.541
3	Soreang	7	8,33	45.760
4	Ujung	5	11,30	35.067
	Jumlah	22	99,33	145.178

Sumber : Kota Parepare dalam angka, 2020

Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa diantara 4 Kecamatan di Kota Parepare wilayah yang terluas terdapat di Kecamatan Bacukiki dengan luas 66,70 Km^2. Kecamatan Bacukiki terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Lompoe, Galung Maloang, Lemoe, dan Watang Bacukiki. Sedangkan wilayah yang terkecil berada di Kecamatan Soreang dengan luas wilayah 8,33 Km^2.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Parepare tahun 2020, jumlah penduduk Kota Parepare sebanyak 145.178 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 71.406 jiwa dan perempuan sebanyak 73.772 jiwa, penduduk yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.760 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat 44.541 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 35.067 jiwa, dan

Kecamatan Bacukiki sebanyak 19.810 jiwa, Jumlah penduduk di kecamatan ini merupakan jumlah penduduk yang terkecil jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya di Kota Parepare.

4.3. Geografis dan Topografi

Ditinjau dari aspek geografi wilayah, lebih dari 85% wilayah Kota Parepare merupakan area yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 Ha, berbukit-bukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.251,04 Ha, sehingga untuk pengembangan fisik kota akan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi ini. Formasi perbukitan ini pada bagian selatan kota mendekat kearah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada di pusat kota yaitu sekitar 1,2 km. Dengan kondisi topografi seperti ini, maka wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat dengan luas keseluruhan ± 1.097,04 Ha, dimana area ini merupakan pusat kegiatan penduduk dan kegiatan perkotaan lainnya. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kota Parepare dengan wilayah yang bergelombang sampai bergunung, maka 87% dari luas wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut, bahkan sampai mencapai ketinggian 500 meter dpl. Daerah dengan ketinggian 0-25 meter dpl, berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk (BPS Kota Parepare, 2020).

Formasi geologi yang terdapat di Kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah kota antara lain : endapan alluvial dan pantai, kerikil, pasir, lempeng dan batu gamping koral, selain itu terdapat juga batu gunung sampai di Kota Parepare seperti breksi dan lava. Jenis tanah yang terdapat antara lain : tanah

Regosol adalah tanah yang memiliki tekstur kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal serta tanah aluvia yaitu tanah dengan endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan (BPS Kota Parepare, 2020).

Berdasarkan jenis pengairan, mayoritas lahan sawah di Kota Parepare merupakan sawah tadah hujan dengan lahan terluas berada di Kecamatan Bacukiki yaitu mencapai 372 hektar dari luas lahan sawah tadah hujan 594 hektar. Sementara untuk jenis sawah teknis hanya terdapat di Kecamatan Bacukiki seluas 240 hektar.

Tabel 3. Luas Lahan Sawah Menurut Sistem Pengairan di Kota Parepare Tahun 2019 (Ha)

Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Non Irigasi	
			Rawa Pasang Surut	Rawa Lebak
Bacukiki	240,0	372,0	0,0	0,0
Bacukiki Barat	0,0	56,0	0,0	0,0
Ujung	0,0	119,0	0,0	0,0
Soreang	0,0	47,0	0,0	0,0
Jumlah	**240,0**	**594,0**	**0,0**	**0,0**

Sumber : Statistik Pertanian Lahan (SP-Lahan) 2019

4.4. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja untuk setiap sektor ekonomi berdasarkan hasil Satuan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020, tercatat sebanyak 67.206 pekerja. Sektor ekonomi dikelompokkan dalam Tiga kelompok yaitu Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Sektor Industri terdiri atas pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan, air, dan konstruksi.

Tabel 4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2020.

Sektor Ekonomi	Persentase (%)	Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)
Pertanian	4,28	2.876
Jasa	77,97	52.401
Industri	17,75	11.929
Jumlah		67.206

Sumber : BPS Indeks Pembangunan Nasional Kota Parepare, 2020

Dari Tiga sektor Pembangunan Nasional Kota Parepare, sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja adalah disektor jasa yaitu sekitar 77,97 persen dari total penduduk yang bekerja di Kota Parepare atau 52.401 jiwa. Penyerapan tenaga kerja dibidang Industri sebanyak 17,75 persen atau 11.929 jiwa. Selanjutnya, pertanian yang merupakan sektor yang paling sedikit jumlah tenaga kerjanya yaitu sebanyak 4,28 persen atau 2.876 jiwa. Berbagai alasan penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian terutama citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan imbalan memadai.

Hal ini sependapat dengan Susilowati (2016) kurangnya minat tenaga kerja muda terjun kesektor pertanian berpangkal dari relatif sempitnya rata-rata penguasaan lahan usaha tani. Alasan lain adalah cara pandang dan way of life tenaga kerja muda telah berubah di era perkembangan masyarakat postmodern seperti sekarang. Bagi anak-anak muda di perdesaan, sektor pertanian makin kehilangan daya Tarik, keengganan anak-anak muda untuk bertani sesungguhnya juga dipengaruhi oleh subkultur baru yang berkembang di era digital seperti sekarang.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Analisis deskriptif responden dalam penelitian ini merupakan uraian atau penjelasan dari hasil pengumpulan data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan karekteristik responden.

5.1.1. Karakteristik Responden Alih Fungsi Lahan

Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 5. Karakteristik responden tersebut terdiri dari tingkat usia, pendidikan, luas lahan, status kepemilikan dan pekerjaan lain dari petani/pemilik lahan.

1. Komponen Responden Berdasarkan Faktor Usia

Persentase Umur berdasarkan data primer responden alih fungsi lahan yang telah diolah menunjukkan bahwa pemilik lahan pada usia 51-60 tahun merupakan responden terbanyak dengan persentase sebesar 46 persen sedangkan yang paling sedikit yaitu responden dengan usia di atas 61 tahun dengan persentase sebesar 13 persen.

2. Komponen Responden Berdasarkan Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan membantu seseorang dalam mengembangkan pola pikir dan menambah wawasan pengetahuan umum. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh besar terhadap sikapnya dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah juga dalam mengambil keputusan (Muryano, 2015).

Tabel 5. Karakteristik Responden yeng memiliki lahan teralihfungsikan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	**Umur (Tahun)**		
	20-40	3	10
	41-50	8	26,6
	51-60	14	46,6
	≥61	5	16,6
2.	**Pendidikan**		
	SD	15	50
	SMP	7	23,3
	SMA	5	16,16
	S-1	3	10
3.	**Luas Lahan (m^3)**		
	200 - 1.000	19	63,3
	1.001 - 3.000	4	13,3
	3.001 - 5.000	3	9
	≥ 5.001	4	13,3
4.	**Status Kepemilikan**		
	Milik Sendiri	16	53
	Milik Orang Tua	10	33,3
	Gabungan	4	13,3
5.	**Pekerjaan Lain**		
	Penjahit	1	3,33
	Buruh/tukang bangunan	8	26,6
	Pedagang campuran	3	10
	Wiraswasta	2	6,6
	Tukang Ojek	5	16,6
	Tokoh Masyarakat	1	3,33
	Petani	1	3,33
	Tukang Kayu/pembuat lemari kayu	6	20
	Ibu Rumah Tangga	1	3,33
	Pedagang Sayur Keliling	1	3,33
	Bengkel Roda Dua /Tambal ban	1	3,33

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Umumnya, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki pola pikir yang lebih berkembang dibandingkan seseorang dengan tingkat pendidikan rendah. Kurangnya pengetahuan atau teori dalam melakukan kegiatan pertanian juga berpengaruh terhadap keputusan seseorang dalam melakukan alih fungsi lahan.

Tingkat pendidikan responden pemilik lahan berbeda-beda, namun jumlah responden yang berpendidikan ditingkat SD yang terbanyak, yaitu berjumlah 15 orang dengan persentase sebesar 52 persen sedangkan responden yang berpendidikan strata satu (S1) hanya 3 orang atau 10 persen dari 30 responden.

3. Komponen Responden Berdasarkan Faktor Luas Lahan

Luas Lahan Responden bervariasi mulai dari 300 m^3 hingga lebih dari 5.000 m^3. Jumlah responden yang mengalihfungsikan atau menjual lahan/sawah dengan luas 300-1.000 m^3 sebanyak 19 orang atau sebesar 63,3 persen, dan jumlah responden terkecil sebanyak 3 responden yang memiliki lahan dengan luas 3.001 - 5.000 m^3 atau sebesar 9 persen.

4. Komponen Responden Berdasarkan Status Lahan

Status kepemilikan lahan responden yang teralih fungsikan terbagi Tiga, lahan milik sendiri, lahan yang dimiliki oleh orang tua dan lahan milik gabungan. Status kepemilikan lahan responden yang teralih fungsikan terbanyak sebesar 52 persen yaitu responden dengan status lahan milik sendiri, sedangkan yang paling sedikit teralih fungsikan adalah status lahan milik gabungan yaitu sebesar 13 persen.

5. Komponen Responden Berdasarkan Faktor Pekerjaan Lain

Salah satu faktor yang membuat responden tidak mempertahankan lahan yang mereka miliki yaitu karena adanya pekerjaan atau usaha lain responden, sehingga kekuatiran responden terhadap pendapatan ekonominya ketika lahan tersebut teralihfungsikan atau terjual tidak berdampak ketika mengambil keputusan.

Pekerjaan lain dari setiap responden alih fungsi lahan berbeda-beda, dimana jumlah terbanyak adalah responden yang memiliki pekerjaan sebagai Buruh/tukang bangunan sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 26,6 persen.

5.1.2. Analisis Luas Alih Fungsi Lahan Petani

Pada Tabel 6. Total luas lahan petani di Kecamatan Bacukiki yang teralihfungsikan sebesar 5,45 hektar dimana lahan tersebut terdiri dari 2,50 hektar berada di wilayah Kelurahan Lompoe dan 2,95 hektar berada di Kelurahan Cappa Galung.

Tabel 6. Luas Lahan Petani yang Teralihfungsikan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

No	Lokasi Lahan	Luas Lahan m3	ha	Persentase (%)
1.	Kelurahan Lompoe	25.020	2,50	45,87
2.	Kelurahan Cappa Galung	29.560	2,95	54,12
	Total	54.580	5,45	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

5.1.3. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Alih Fungsi Lahan

Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, telah dihasilkan bahwa alih fungsi lahan pertanian banyak terjadi di Kecamatan Bacukiki. Alih fungsi lahan banyak mengarah pada pembangunan perumahan yang berdampak pada status pekerjaan dan pendapatan petani, selain itu telah ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan tersebut.

Pada Tebel 7. menunjukkan beberapa alasan responden yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yaitu 10 responden memiliki alasan musim hujan sulit di prediksi/lahan tidak produktif dengan persentase tertinggi sebesar 33,3 persen dibanding alasan responden lainnya, namun persentasi terendah sebesar 10 persen atau sebanyak 3 responden dengan alasan lahan sawah digarap oleh orang lain.

Tabel 7. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

No.	Alasan Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Musim Hujan Sulit di Prediksi/lahan tidak produktif	10	33,3
2.	Untuk Modal Usaha	7	23,3
3.	Untuk Kebutuhan Rumah Tangga	6	20
4.	Hasil Penjualan ingin dibagi ke Anak/saudara	4	13,33
5.	Sawah Digarap Oleh Orang Lain	3	10
		30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

5.1.4. Analisis Pendapatan Petani Berdasarkan Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bacukiki

Analisis rata-rata pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan di Kecamatan Bacukiki berdasarkan faktor penyebab dapat dilihat pada Tabel 8. Pendapatan petani menurun terbesar yaitu dengan faktor penyebab sawah digarap oleh orang lain pendapatan rata-rata petani berkurang setelah lahan milik petani teralih fungsikan yaitu sebesar 20,3 persen. Sedangkan pendapatan petani yang mengalami kenaikan terbesar setelah lahan teralih fungsikan yaitu petani yang hasil penjualan lahannya digunakan untuk modal usaha dimana pendapatan rata-rata responden naik setelah lahan beralih fungsi atau terjual sebesar 19,9 persen.

Tabel 8. Rata-rata Pendapatan Petani Berdasarkan Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

No.	Faktor Penyebab	Rata-rata Pendapatan Rp/bulan		Persentase (%)
		Sebelum	Setelah	
1.	Musim Hujan Sulit di Prediksi/lahan tidak produktif	2.418.199	2.253.367	-6,8
2.	Untuk Modal Usaha	2.579.196	3.222.762	19,9
3.	Untuk Kebutuhan Rumah Tangga	1.734.943	1.986.667	12,6
4.	Hasil Penjualan ingin dibagi ke Anak/saudara	2.347.006	2.017.917	-14,2
5.	Sawah Digarap Oleh Orang Lain	3.262.347	2.600.000	-20,3

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

5.1.5. Hipotesis Analisis Bivariat

Sebelum melakukan analisis bivariat pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap penghasilan petani sebelum dan setelah lahan teralihfungsikan seperti yang disajikan pada Tebel 9.

Tabel 9. Uji Normalitas Pendapatan Petani Pemilik Lahan Sebelum dan Setelah Lahan dialihfungsikan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Pendapatan Petani	Sig	Keterangan
Pendapatan sebelum alih fungsi lahan	0,307	Berdistribusi Normal
Pendapatan setelah alih fungsi lahan	0,001	Tidak Berditribusi Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk, data pendapatan petani sebelum alih fungsi lahan berdistribusi normal karena nilai Significancy 0,307 > 0,05, akan tetapi data pendapatan petani setelah alih fungsi lahan berdistribusi tidak normal karena nilai Significancy 0.001 < 0,05. Karena salah satu data ada yang tidak berdistribusi normal, maka untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik non parametrik yaitu Uji Wilcoxon seperti pada Tabel10.

Tabel 10. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test Pada Pendapatan Petani Pemilik Lahan Sebelum dan Setelah Lahan dialihfungsikan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Ranks	**N**	**Mean Rank**
Negative Ranks	12[a]	16.25
Positive Ranks	18[b]	15.00
Ties	0[c]	
Total	30	

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Dari hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test Terdapat 12 orang dengan pendapatan setelah alih fungsi lahan lebih rendah daripada sebelum alih fungsi lahan. Hasil output menunjukkan 18 orang mempunyai pendapatan setelah alih fungsi lahan lebih tinggi daripada sebelum alih fungsi lahan.

Negative Ranks adalah Sampel dengan pendapatan petani setelah alih fungsi lahan **lebih rendah** daripada sebelum alih fungsi lahan yaitu 16.25 sedangkan Positive ranks adalah sampel dengan pendapatan petani setelah alih fungsi lahan **lebih tinggi** daripada sebelum alih fungsi lahan yaitu 15.00.

Ties adalah kesamaan nilai pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan disini nilai ties adalah 0, sehingga dapat dikatakan tidak ada nilai yang sama antara pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan.

Tabel 11. Output Test Statistic Pada Pendapatan Petani Pemilik Lahan Sebelum dan Setelah Lahan dialihfungsikan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Pendapatan setelah alih fungsi lahan - Pendapatan sebelum alih fungsi lahan	
Z	-.771[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.441

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Pada Tabel 11. Hasil Test Statistik Pada Pendapatan Petani Pemilik Lahan Sebelum dan Setelah Lahan dialihfungsikan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Menunjukkan Nilai Z yang di dapat ialah sebesar -.771 dengan p value (Asymp. Sig 2 taileda) sebesar .441 .

5.2. Pembahasan

5.2.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Alih Fungsi Lahan

Dari data primer yang telah diolah berdasarkan alasan petani, dapat dilihat pada Tabel 7. Faktor yang menyebabkan lahan pertanian teralihfungsikan adalah faktor iklim atau hujan sulit diprediksi. Hujan merupakan satu-satunya sumber irigasi sawah tadah hujan di lokasi penelitian pada saat bercocok tanam sulit diprediksi oleh petani, sehingga petani ragu untuk memulai bercocok tanam di lahan tersebut ditambah biaya pengolahan, harga pupuk dan pestisida meningkat. Namun hal yang sering terjadi ketika masa panen hasil produksi tidak sesuai dengan harapan petani hasil produksi sawah tersebut menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Para petani menganggap bahwa lahan sawah yang telah diolah selama ini tidak lagi produktif, alasan tersebut merupakan faktor tertinggi petani dalam mengalihfungsikan atau menjual sawahnya menjadi lahan non pertanian yaitu sebesar 33,3 persen, hal ini sesuai dengan pendapat Sihaloho, (2007) bahwa faktor tersebut merupakan salah satu penggerak utama terhadap konversi lahan dengan tipologi konversi gradual-berpola sporadik, dimana pola konversi yang diakibatkan oleh faktor lahan yang tidak/kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi.

Faktor penyebab terkecil lahan teralihfungsikan adalah sawah milik petani yang digarap oleh orang lain dengan sistem perjanjian bagi hasil lahan teralihfungsikan yaitu sebesar 10 persen. Pengalaman bertani serta waktu yang terbatas karena adanya pekerjaan lain untuk memulai bertani merupakan salah satu

faktor sehingga lahan tersebut diberikan ke orang lain atau keluarga untuk digarap disamping itu minat masyarakat terutama yang berdomisili di pinggiran perkotaan enggan untuk bekerja sebagai petani hal ini dapat dilihat didalam data BPS Indeks Pembangunan Nasional Kota Parepare, 2020 pada Tabel 4. Penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian paling sedikit dibanding sektor jasa dan industri hal ini menandakan bahwa minat kerja masyarakat untuk bertani di Kota Parepare sangat rendah. Pemilikan dan atau penguasaan lahan yang luas bukanlah merupakan satu-satunya yang menentukan tingkat kesejahteraan suatu keluarga atau rumah tangga.

Timbulnya perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Kelurahan Lumpue dan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki dikarenakan pemilik sawah dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah sawahnya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya, oleh karena itu pemilik sawah menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah tanah pertaniannya dengan cara bagi hasil.

Ginting (2008), menyatakan dasar transaksi ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu. Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan dengan menggunakan sistem yang berdasarkan pada dua musim tanam, yang berarti satu kali musim untuk tanaman padi dan satu kali untuk tanaman sayur. Sistem pembagian bagi hasil tanah pertanian ini pemilik dan penggarap sawah mendapatkan setengah bagian apabila semua biaya pengolahan sawah ditanggung oleh pemilik sawah, sedangkan pemilik mendapatkan sepertiga bagian apabila semua biaya pengolahan sawah ditanggung oleh penggarap sawah. biaya-biaya tersebut meliputi pembelian pupuk, bibit, dan

obat-obatan yang digunakan dalam pengolahan sawah. Namun bagi hasil yang di dapat dari pemilik lahan tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga seiring berjalannya waktu lahan sawah tersebut dijual oleh petani.

Menurut Rauf A.H (2018), Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan, masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya, mereka beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan disisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga dalam mengembangkan atau beralih keusaha lain petani sebanyak 23,3 persen membutuhkan tambahan modal yang hanya bisa di peroleh dari hasil penjualan lahan/sawah yang mereka miliki faktor ini merupakan faktor kedua tertinggi alasan petani mengalihfunsikan lahannya.

5.2.2. Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Ekonomi Petani Berdasarkan Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bacukiki

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari T. (2003), diketahui faktor penyebab alih fungsi dari sisi eksternal dan internal petani, yakni tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi. Hal tersebut menyebabkan banyak petani menjual asetnya berupa sawah untuk memenuhi kebutuhan yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. hidup yang berdampak meningkatkan alih

fungsi lahan sawah dan makin meningkatkan penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal.

Pendapatan Ekonomi Petani Berdasarkan Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan berdasarkan data primer pada Tabel 8. yaitu faktor penyebab/ alasan petani, dari hasil tersebut diperoleh rata-rata pendapatan ekonomi petani sebelum dan setelah alihfungsi lahan. Rata-rata pendapatan ekonomi petani mengalami kenaikan terbesar setelah lahan dialihfunggsikan yaitu petani yang menjual lahannya dengan alasan lahan untuk dijadikan modal usaha kenaikan tersebut sebesar 19,9 persen atau dari rata-rata pendapatan sebelumnya sebesar Rp2.579.196 menjadi Rp3.222.762.

Petani yang mengalihfungsikan lahan sawahnya dikarenakan lahan tersebut selama ini digarap oleh orang lain mengalami penurunan pendapat terbesar yaitu pendapatan rata-rata petani turun sebesar 20,3 persen setelah petani menjual lahannya dimana pendapatan rata-rata sebelum sebesar Rp3.262.347 dan setelah alih fungsi lahan pendapatan rata-rata petani menjadi Rp2.600.000

5.2.3. Analisis Bivariat Terhadap Pendapatan Petani Sebelum Dan Setelah Alih Fungsi Lahan

Pada Tabel 11. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25 pada table output yang kedua diperoleh nilai Significancy (Sig.) atau *p value* = 0,441 > 0,05 sehingga **H_0 diterima** dan H_a ditolak, artinya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan, dengan kata lain alih fungsi lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan petani. Hal ini dikarenakan rata-rata petani di Kecamatan Bacukiki memiliki

pekerjaan lain selain bertani dimana pekerjaan tersebut tentunya turut menunjang pendapatan ekonomi rumah tangga ketika lahan pertanian tidak digarap karena faktor iklim yang tidak mendukung.

Hal ini sependapat dengan Nurmanaf dan Nasution (1986) bahwa pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian tampak memberikan konstribusi yang lebih besar terutama di daerah yang kurang subur dan jenis kegiatan diluar sektor pertanian yang mampu memberikan pendapatan yang tinggi menuntut penguasaan modal dan keterampilan.

Setelah lahan dialihfungsikan petani akan lebih fokus lagi terhadap pekerjaan lainnya dan tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk aktivitas pertanian, sehingga pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut hanya untuk kebutuhan rumah tangga petani dan mampu menunjang kebutuhan ekonominya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Bacukiki adalah petani menjual lahan sawah dikarenakan musim hujan sulit diprediksi/lahan tidak produktif dengan persentase sebesar 33,3 persen.
2. Pendapatan rata-rata petani mengalami kenaikan tertinggi setelah lahan dialihfungsikan yaitu pada faktor untuk modal usaha dimana kenaikan pendapatan rata-rata petani setelah lahan dialihfungsikan sebesar 19,9 persen. Sedangkan pendapatan rata-rata petani mengalami penurunan terbesar setelah lahan dialihfungsikan yaitu 20,3 persen pada faktor sawah digarap oleh orang.
3. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan, namun bila dilihat secara simultan terdapat perbedaan yang signifikan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kota Parepare adalah salah satu kota kecil yang cukup berkembang dari segi pembangunan infrastruktur kesehatan, Pendidikan, hiburan sehingga menjadi salah satu daya Tarik warga daerah lain untuk berinvestasi perumahan/tinggal di Kota Parepare sehingga pertumbuhan penduduk di Kota Parepare menjadi meningkat dan lahan pertanian semakin sempit untuk itu perlu ada penekanan atau batasan terhadap migrasi pendatang.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan tinjauan ulang dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan pembangunan yang dilakukan dilahan pertanian dan memetakan wilayah mana saja yang akan digunakan untuk keperluan non pertanian serta wilayah yang digunakan sebagai penopang pangan daerah.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor lain selain faktor ekonomi yang mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan sehingga lahannya teralihfungsikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Erlangga. Jakarta.

Astuti, DI. 2011. Keterkaitan Harga Lahan Terhadap Laju Konversi Lahan Pertanian Di Hulu Sungai Ciliwung. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. 2016. *Kecamatan Bacukiki dalam Angka.* Parepare : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. 2011. *Parepare dalam Angka.* Parepare : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. 2020. *Parepare dalam Angka.* Parepare : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. 2019. *Statistik Pengguna Lahan Kota Parepare*. Parepare : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. 2020 *Indeks Pembangunan Nasional Kota Parepare*. Parepare : Badan Pusat Statistik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2011, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pareapare 2011-2031*. Parepare : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Ginting, Malem. 2008. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang –Undang No. 2 Tahun 1960. Medan: Pustaka Bangsa Press

Gujarati, DN. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika. Erlangga, Jakarta

Hamzah, Purbiyanti, M. Mulyana, E. dan Eka. 2014. *Keputusan Petani untuk Mengkonversi/tidak Mengkonversi di Tipologi Lahan Sawah Irigasi Teknis dan Sawah Pasang Surut di Sumatera Selatan.* Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Barat : 19-21 Agustus 2014. Fakultas Pertanian. Universitas Sriwijaya. Bandar Lampung.

Ilham N, Syaukat Y, Friyanto S. 2006. Perkembangan dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah serta Dampak Ekonominya. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis SOCA*. Vol. 5 No. 2: 123-241.

Irawan B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. [Internet]. [dikutip 18 Maret 2012]. Vol. 23 No. 1: 1-18. Hal. 1-16. Dapat diunduh dari: httppse.litbang.deptan.go.idindpdffilesFAE23-1a.pdf

Lapatandau, YA. Rumagit, G. dan Pakasi, C. 2017. Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara, 13(2A), 1-8

Lestari, T., 2009.Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Makalah Kolokium. Deprtemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat tanggal 21 April 2009. Bogor. Intitut Pertanian Bogor

Munir M. 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kasus: Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Muryano A. 2015. Pola Pikir Sistem. Yokyakarta : Gadjah Mada University Press.

Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nasoetion L, J Winoto. 1996. Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan. Prosiding Seminar Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Nurmanaf, A. R. dan A. Nasution, 1986. Ragam Sumber Pendapatan Rumahtangga. Bogor: Pusat Penelitian Agro Ekonomi.

Nuryati, L . 1995. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Kepenggunaan Non Sawah . Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafa'at. 1993. Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Putri, B 2008. Transformasi Struktur Ekonomi dan Pembangunan Pertanian. Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rauf, A. 2018. Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Yogyakarta.

Ritung, S. Nugroho, K. Mulyono, A. Suryani, E. 2011. *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian* (*Edisi Revisi*). Bogor (ID): Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Singarimbun, M. dan Sofian, E. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES

Sihaloho, M. 2007. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria (Kasus di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat). Tesis Pasca Sarjana. Bogor: IPB.

Syaifuddin, Hamire, A. Dahlan. 2013. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jurnal Agrisistem. Vol. 9/2, pp. 169-179.

Stang. 2018. Cara Praktis Penentuan Uji Statistik Dalam Penelitian Kesehatan Dan Kedokteran. Penerbit Mitra Wacana Media : Jakarta

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualititatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sumaryanto dan Tahlim, S. 2005. Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya. Prosiding seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian pertanian abadi. Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sumaryanto, Hermanto, dan E. Pasandaran. 1996. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Sosial Ekonomi Petani. Dalam Prosiding Lokakarya " Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air": Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 92 - 112. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor

Supriyadi A. 2004. Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan (Studikasus: Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Susanto D. 2010. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 8(1):77-89.

Susilowati Sri H. 2016 Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jurnal Forum Penilitian Agro Ekonomi. 34(1):35-55.

F.L,Whitney.1960.*The Elements of Resert. Asian Eds.* Osaka: Overseas Book Co

Winoto J. 2005. Kebijakan pengendalian alih fungsi tanah pertanian dan implementasinya. dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyaningsih DI, editor. *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. ISBN: 979-8637-31-3. Bogor (ID): Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM – Institut Pertanian Bogor. Hal: 16-17.